

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan dalam Informasi dan Teknologi dapat dengan cepat berkembang dari waktu ke waktu, seperti yang dapat kita lihat dari beberapa bidang seperti Pendidikan, keamanan negara, pelayanan publik bahkan sosial dan sebagainya. Contoh halnya pelayanan publik yang memerlukan pelayanan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel. Maka masyarakat dapat menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan teknologi dan informasi yang dimilikinya untuk mendukung proses pelayanan publik dengan baik dan benar. Untuk memenuhi itu semua pemerintah memenuhi kewajiban tersebut dengan selalu memperbaiki kualitas layanannya. Untuk memenuhi kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi maupun pihak yang mengelola data-data dengan cepat agar efektif dan efisien.

Untuk penerapan teknologi informasi pada pemerintahan disebut dengan *e-Government*. Data yang dilansir dalam *e-Government Development Index* (EGDI) pada tahun 2018 mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan yang ke-107 dari seluruh negara di dunia, dan peringkat ke-7 dari seluruh negara di ASEAN dengan nilai rata-rata 0.5258 yang ternyata masih berada di bawah nilai rata-rata EGDI di Asia Tenggara yaitu 0.5555. Dengan dilihatnya nilai rata-rata tersebut, maka Indonesia menduduki posisi yang jauh dibanding negara ASEAN lainnya. Dari fakta ini Indonesia semakin tergerak untuk meningkatkan dan menerapkan *eGovernment* dengan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dengan adanya urgensi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang pelaksanaan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan bentuk integrasi dari system *e-Government* yang selama ini di terapkan. Tujuan penerapan ini agar mewujudkan responsive yang cepat dari pemerintah untuk masyarakat terutama di aplikasi *e-Government*.

Dari hasil penelitian sebelumnya pada domain aplikasi di Lingkungan Kabupaten Sukabumi memiliki Aplikasi *existing* sebanyak 96 Aplikasi yang terdiri dari 30% Aplikasi Umum dan 70% aplikasi Khusus, dimana sebesar 93% Aplikasi yang masih dalam keadaan aktif digunakan, dan 7% yang tidak aktif dikarenakan berbagai alasan seperti, aplikasi tidak dapat diakses, dan status aplikasi sedang dalam proses penyelesaian administrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan di dapatkan permasalahan lainnya seperti aplikasi *e-Government* masih memiliki kendala seperti belum menerapkan aplikasi layanan *Whistle Blowing System* (WBS), belum adanya media integrasi yang menghubungkan satu dengan lainnya untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif, belum adanya aplikasi untuk layanan administrasi pemerintah dan penyedia layanan umum, belum adanya aplikasi untuk pengelolaan data statistic dan satu data, dan masih adanya aplikasi yang di host di luar pihak pusat data Kabupaten Sukabumi. Yang mana jika dilihat permasalahan ini belum mencapai target dari pelaksanaan SPBE ini.

Dari permasalahan yang terdapat pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi maka dibutuhkannya perancangan *Enterprise Architecture* untuk mendukung SPBE agar pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntable dan transparan. *Enterprise Architecture* adalah gambaran dari model proses bisnis yang akan mengoptimalkan untuk mencapai tugas-tugas organisasi dengan melibatkan teknologi informasi. Singkatnya, EA adalah cetak biru sistematis yang dapat secara lengkap mendefinisikan organisasi saat ini atau apa yang diinginkan organisasi dalam suatu ruang lingkup dengan menggunakan EA kita dapat mengetahui rancangan Aplikasi yang selaras dengan kebutuhan perusahaan, dan untuk merancangnya kita membutuhkan sebuah framework yang berguna untuk pengembangan dan penyelarasan proses bisnis. Framework yang digunakan untuk merancang EA pada domain aplikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi adalah *Framework Hevner*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dimana terdapat banyak permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi seperti aplikasi tidak dapat diakses, status aplikasi sedang dalam proses penyelesaian administrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika aplikasi e-Government masih memiliki layanan Whistle Blowing System (WBS), belum adanya media integrasi yang menghubungkan satu dengan lainnya untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif, belum adanya aplikasi untuk layanan administrasi pemerintah dan penyedia layanan umum, belum adanya aplikasi untuk pengelolaan data statistic dan satu data, dan masih adanya aplikasi yang di host di luar pihak pusat data Kabupaten Sukabumi.

Maka di dapatkan permasalahan secara garis besar yang perlu di selesaikan pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran model *Enterprise Architecture* SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi pada domain aplikasi yang dimiliki sudah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah Mengusulkan *Enterprise Architecture* SPBE pada domain aplikasi pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan amanah Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Memberikan sebuah usulan rancangan *Enterprise Architecture* SPBE di domain Aplikasi pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.
2. Dimilikinya standar *Enterprise Architecture* pada domain aplikasi pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang nantinya dapat di implementasikan pada suatu instansi pemerintahan.

I.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perancangan *Enterprise Architecture* SPBE yang berfokus pada domain Aplikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.
2. Menggunakan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 sebagai acuan dalam perancangan EA SPBE pada domain aplikasi Kabupaten Sukabumi.
3. Perancangan EA pada domain aplikasi berdasarkan program prioritas dalam rangka 100 hari kerja yang berpatok pada RPJMD Pemkab sukabumi 2021-2026.